

Evaluasi Integrasi SDGs 4 Dalam Kebijakan Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya

Azizah Nailah Mahirah¹, Avikah Zackia Putri², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674094@mhs.unesa.ac.id, 25040674172@mhs.unesa.ac.id, evafanida@unesa.ac.id, meldahidayat@unesa.ac.id

Article History:

Received: 28 April 2026

Revised: 21 Juni 2026

Accepted: 06 Juli 2026

Keywords: *Expenditure, Pendidikan Berkualitas, SDGs 4, APBD, Pemerintahan Kota Surabaya.*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis efektivitas pengeluaran pemerintah (public expenditure) sektor pendidikan dalam mendukung SDGs 4 di Pemerintahan Kota Surabaya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder, studi ini membedah APBD 2025 dan capaian kinerja pelayanan dasar. Temuan menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya konsisten mengalokasikan 20,96% anggaran pendidikan, melampaui mandat konstitusi 20%. Anggaran difokuskan pada program strategis seperti Beasiswa Pemuda Tangguh dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 100%. Meski pengeluaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang, kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Surabaya hingga 14,85 tahun. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi dan ketepatan sasaran belanja publik menjadi kunci utama keberlanjutan pendidikan berkualitas di tingkat lokal.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi krusial dalam sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Di Indonesia, komitmen ini diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 31 UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003, yang mensyaratkan setidaknya 20% dari anggaran negara dialokasikan untuk sektor pendidikan. Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran untuk pendidikan dapat menambah beban keuangan dalam jangka pendek, dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara terlihat dalam jangka panjang. Namun, di tingkat nasional, pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 4 yang berorientasi pada pendidikan berkualitas masih menghadapi banyak tantangan besar. Meskipun 20% anggaran telah dialokasikan, efektivitas penggunaannya sering terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien dan ketidakakuratan dalam distribusi dana. Hal ini terlihat dari angka kelulusan pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) di Indonesia yang masih rendah, yaitu hanya 66,13% pada tahun 2022.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Kota Surabaya menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai SDG 4. Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp2,35 triliun, yang berkontribusi sebesar 20,96% dari total pengeluaran daerah. Alokasi ini diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat, seperti yang ditunjukkan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pendidikan yang berhasil mencapai 100% di tahun 2023. Komitmen fiskal yang tinggi ini juga menciptakan optimisme dalam sektor pendidikan, dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Surabaya mencapai 14,87 tahun, yang setara dengan pendidikan tingkat Diploma III.

Namun, tantangan utama yang ada adalah perbedaan antara kapasitas fiskal yang besar dan kondisi nyata di lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas antara angka HLS yang tinggi dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang terjebak di angka 10,89 tahun di Surabaya. Perbedaan ini didukung oleh data dari Kementerian Pendidikan tahun 2024, yang mencatat terdapat 12. 517 anak putus sekolah di Surabaya, yang mencakup mereka yang drop out (DO) maupun yang lulus tetapi tidak melanjutkan (LTM) membuat Surabaya menjadi daerah kelima dengan angka putus sekolah tertinggi di Jawa Timur. Tingginya angka putus sekolah meskipun ada anggaran yang cukup besar menunjukkan bahwa masalah mendasarnya tidak hanya terletak pada fasilitas, tetapi juga tantangan dalam pengelolaan data dan ketepatan dalam penyaluran bantuan sosial.

Sebagai upaya untuk mengatasi isu ini, pengeluaran pemerintah di Surabaya kini lebih terfokus pada program-program strategis yang responsif dan fleksibel. Salah satu langkah konkret dari intervensi ini adalah peningkatan dana untuk Program Beasiswa Pemuda Tangguh, yang diproyeksikan melonjak menjadi Rp190,56 miliar dengan kuota 23. 850 mahasiswa pada tahun 2026, ini merupakan langkah perbaikan setelah diketahui bahwa 70 persen penerima beasiswa sebelumnya tidak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan pembebasan biaya operasional secara penuh bagi siswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bersekolah di SD dan SMP swasta melalui jalur afirmasi. Berdasarkan perkembangan ini, makalah ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana pengelolaan pengeluaran publik, terutama dalam hal efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran, dapat berkontribusi pada keberlanjutan pendidikan yang berkualitas di Kota Surabaya.

LANDASAN TEORI

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) menjadi pijakan utama dalam memahami urgensi penganggaran di sektor pendidikan. Konsep ini secara tegas menyatakan bahwa "pendidikan adalah bentuk investasi modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan di masa depan" (Becker, 1964; Schultz, 1961). Dalam konteks makro, alokasi untuk sektor ini adalah pendorong utama karena "peningkatan modal manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara" (Suwandaru, Alghamdi, & Nurwanto, 2021). Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai beban fiskal, melainkan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Teori Keuangan Publik dan Pengeluaran Pemerintah Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada Teori Keuangan Publik yang menyoroti urgensi kehadiran pemerintah. Teori ini menekankan bahwa "tidak semua masalah ekonomi dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar, terutama barang sosial. Mekanisme pasar pada dasarnya digunakan oleh individu untuk mencari keuntungan pribadi, yang membuat kegiatan ekonomi

kolektif, publik, atau nirlaba tidak layak dilakukan melalui pasar" (Musgrave, 1959),. Melalui fungsi pengeluaran publik, pemerintah harus secara aktif mengintervensi penyediaan layanan pendidikan dasar hingga menengah untuk menjamin aksesibilitas yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 tentang Pendidikan Berkualitas *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global di mana "tujuan keempat, berfokus pada pendidikan dan bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang" (Hasibuan, 2024). Salah satu indikator krusial dalam mengukur kesuksesan pencapaian SDG 4 adalah tingkat penyelesaian pendidikan, yang secara spesifik mengukur "seberapa banyak anak-anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan mereka dan melanjutkan ke tingkat berikutnya tanpa penundaan yang signifikan" (Witta & Handra, 2025).

Dinamika Pengeluaran Publik dan Tata Kelola Birokrasi Penelitian empiris menunjukkan bahwa secara umum, "ketika pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, tingkat penyelesaian pendidikan cenderung meningkat" (Witta & Handra, 2025). Meski demikian, besarnya kuantitas anggaran tidak selalu menjamin kesuksesan apabila tidak dikelola dengan akurat. Kegagalan transmisi anggaran seringkali disebabkan oleh kelemahan birokrasi, di mana "pengeluaran publik diserap oleh sistem birokrasi yang inefisien... sehingga tujuan dari pengeluaran publik tersebut tidak terpenuhi" (Suwandar, Alghamdi, & Nurwanto, 2021). Fakta empiris ini menegaskan bahwa untuk menyukseskan SDG 4, intervensi fiskal melalui anggaran pendidikan harus dibarengi dengan tata kelola penapisan (*targeting*) yang ketat, transparan, dan langsung menyentuh kelompok sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kebijakan fiskal daerah. Desain penelitian ini dipilih untuk memberikan penjelasan faktual mengenai bagaimana alokasi pengeluaran pemerintah (expenditure) pada sektor pendidikan di Kota Surabaya dikelola dan diselaraskan secara strategis dengan target global SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas. Sebagai penelitian kualitatif yang berbasis pada data sekunder, studi ini tidak melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian, melainkan menginterpretasikan data anggaran dan capaian kinerja secara sistematis guna menarik kesimpulan mengenai efektivitas tata kelola keuangan publik di tingkat lokal.

Objek penelitian utama dalam kajian ini adalah postur pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, serta dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Periode 2025-2029. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang melakukan peninjauan kritis terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah dan literatur global. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi yang terstruktur dengan menghimpun angka-angka belanja fungsi pendidikan, laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta indikator makro pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang bersumber dari portal resmi Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori investasi modal manusia dari jurnal internasional terindeks Scopus sebagai pembanding untuk memvalidasi dampak pengeluaran publik dalam jangka panjang.

Prosedur analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi reduksi data untuk memfokuskan pada program belanja strategis seperti Beasiswa Pemuda Tangguh, penyajian data dalam bentuk narasi analitis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output capaian kinerja daerah. Melalui teknik analisis konten ini, peneliti berupaya membedah sejauh mana ketepatan sasaran belanja publik dalam menjamin keberlanjutan akses dan mutu pendidikan di Kota Surabaya. Dengan memberikan detail yang memadai pada setiap tahapan, diharapkan pembaca dapat memahami logika penelitian dan proses evaluasi efektivitas anggaran yang digunakan sebagai instrumen pencapaian SDG 4 di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah melampaui mandat konstitusi dengan mengalokasikan 20,96% APBD Tahun Anggaran 2025 (sekitar Rp2,35 triliun) untuk sektor pendidikan, besaran pengeluaran fiskal tersebut tidak secara otomatis menuntaskan tantangan wajib belajar 12 tahun. Intervensi anggaran terbukti secara efektif mendorong optimisme pendidikan yang tercermin pada tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di level 14,87 tahun (setara Diploma III). Namun, terdapat paradoks di mana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih tertahan di angka 10,89 tahun, diiringi dengan temuan 12.517 anak berstatus putus sekolah di Surabaya pada tahun 2024. Temuan ilmiah utama dari studi ini menegaskan bahwa untuk mencapai target SDG 4, tantangan fundamentalnya bukan lagi pada ketersediaan besaran dana, melainkan pada akurasi pendataan sasaran dan efisiensi birokrasi dalam menyalurkan bantuan sosial pendidikan.

(a) Hubungan Hasil dengan Pertanyaan/Tujuan Awal (Apa dan Bagaimana)

Menjawab pertanyaan awal mengenai bagaimana tata kelola pengeluaran publik berkontribusi pada SDG 4, temuan menunjukkan bahwa arsitektur anggaran pendidikan sangat didominasi oleh beban birokrasi. Dari total pengeluaran belanja daerah, porsi terbesar tersedot untuk Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai yang mencapai Rp1,11 triliun. Meski demikian, untuk menutup kesenjangan RLS, pemerintah berupaya meredistribusi kekayaan melalui intervensi langsung, seperti pembebasan biaya operasional sekolah swasta bagi siswa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Perwali No.49 Tahun 2020 dan eskalasi anggaran Beasiswa Pemuda Tangguh yang diproyeksikan melonjak tajam menjadi Rp190,56 miliar pada tahun 2026. Strategi ini merupakan bentuk nyata intervensi fiskal yang bertransisi dari sekadar "pembangunan infrastruktur fisik" menjadi "investasi kesejahteraan siswa" guna mewujudkan konsep pemerataan 1 KK 1 Sarjana.

(b) Interpretasi Ilmiah atas Temuan (Mengapa) Interpretasi ilmiah dari masih tingginya angka putus sekolah di tengah melimpahnya anggaran bermuara pada dua disfungsi tata kelola: kelemahan administratif dan kesalahan sasaran (mistargeting). Secara administratif, angka putus sekolah yang tinggi tidak semata-mata mencerminkan kemiskinan ekstrem, melainkan anak-anak yang melanjutkan ke lembaga pendidikan non-formal (seperti pesantren tanpa PKBM) tidak terdaftar di sistem Dapodik nasional.

Lebih lanjut, secara tata kelola bantuan sosial, analisis lapangan membuktikan adanya kebocoran alokasi. Evaluasi pemerintah kota menemukan bahwa 70 persen penerima Beasiswa Pemuda Tangguh di masa sebelumnya terindikasi tidak tepat sasaran, di mana bantuan tersebut

justru dinikmati oleh mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi (penghasilan di atas Rp15-20 juta) yang masuk melalui jalur mandiri. Fakta ini memberikan karakterisasi yang valid mengapa besaran anggaran tidak selalu paralel dengan output penyelesaian pendidikan; ketika mekanisme penapisan (screening) penerima bantuan lemah, instrumen public expenditure gagal menjalankan fungsi redistribusi perlindungan sosial yang optimal.

(c) Konsistensi dan Perbedaan dengan Publikasi Sebelumnya (Apa Lagi / Perbedaan) Hasil penelitian ini sangat konsisten dengan temuan Witta & Handra (2025) yang melaporkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan secara agregat seringkali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyelesaian pendidikan tingkat menengah akibat tingginya beban belanja pegawai dan adanya mistargeting. Temuan ini juga mengafirmasi studi Suwandaru dkk. (2021) yang menyatakan bahwa transmisi pengeluaran publik sektor pendidikan kerap berjalan lambat dan bahkan berdampak negatif dalam jangka pendek karena inefisiensi birokrasi dan masalah tata kelola.

Meski sejalan secara fundamental, penelitian ini menawarkan perbedaan temuan (novelty) yang penting di tingkat lokal. Jika studi-studi terdahulu hanya menyimpulkan bahwa belanja sosial/pendidikan tidak efektif, temuan di Surabaya memperlihatkan kemampuan resiliensi dan koreksi kebijakan yang adaptif dari pemerintah daerah. Menghadapi inefisiensi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya terbukti melakukan pengetatan sasaran dengan menaikkan standar akademik (IPK menjadi 3,0), mengintegrasikan pendataan hingga level RT/RW, dan mencabut bantuan bagi golongan non-MBR secara real-time. Hal ini mengindikasikan bahwa inefisiensi anggaran pendidikan (mistargeting) bukanlah kondisi yang statis, melainkan dapat diregulasi kembali melalui evaluasi berbasis kinerja untuk mendorong capaian SDG 4 yang sesungguhnya.

Postur pengeluaran publik Pemerintah Kota Surabaya untuk sektor pendidikan didominasi oleh pos Belanja Operasi, yang nilainya jauh melampaui Belanja Modal. Rincian alokasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Alokasi Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025

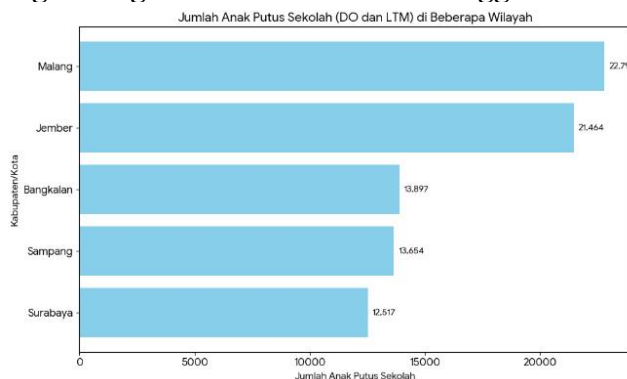
Komponen Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)
Belanja Operasi	2.136.220.755.357
Belanja Pegawai	1.115.127.922.865
Belanja Barang dan Jasa	700.085.876.114
Belanja Hibah	321.006.956.378
Belanja Modal	213.779.747.962
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.556.005.171
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.299.387.341
Belanja Modal Aset Tetap & Lainnya	924.355.450
Total Belanja Daerah	2.350.000.503.319

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Rekapitulasi SKPD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025

Meskipun Kota Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk mengamankan anggaran fungsi pendidikan, tantangan dalam menuntaskan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih sangat krusial. Permasalahan utama yang teridentifikasi bukan pada keterbatasan fasilitas,

melainkan pada kelemahan sistem pendataan anak putus sekolah, khususnya yang melanjutkan ke lembaga non-formal tanpa terdaftar di sistem data pendidikan nasional. Perbandingan jumlah anak putus sekolah di Kota Surabaya dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Lima Daerah dengan Angka Putus Sekolah Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2024



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Data Kementerian Pendidikan Tahun 2024

Fenomena pada Tabel 2 mengonfirmasi bahwa besarnya pengeluaran pemerintah (public expenditure) tidak secara instan menghapus kesenjangan penyelesaian pendidikan tingkat menengah. Sebagai bentuk intervensi langsung untuk mengurai kendala ekonomi yang sering menjadi penyebab utama putus sekolah, Pemerintah Kota Surabaya mendistribusi anggarannya melalui program afirmasi perlindungan sosial pendidikan. Berdasarkan evaluasi kinerja, pemerintah daerah secara progresif melakukan eskalasi pada Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Rincian peningkatan kuota dan alokasi anggaran program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tren Peningkatan Kuota dan Anggaran Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data Pemerintah Kota Surabaya (2025)

Peningkatan masif yang tergambar pada Tabel 3 tidak terlepas dari proses evaluasi mendalam, di mana sebelumnya ditemukan sekitar 70 persen penerima beasiswa tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi (berpenghasilan Rp15–20 juta) yang masuk melalui jalur mandiri perguruan tinggi. Dengan penataan ulang standar kualifikasi penerima, termasuk pengetatan syarat IPK menjadi 3,0, serta

perluasan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), skema pendanaan ini diproyeksikan mampu mendorong pencapaian SDG 4 serta mewujudkan target 1 KK 1 Sarjana.

Menjawab pertanyaan awal tentang bagaimana pengelolaan pengeluaran publik berkontribusi terhadap SDG 4, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar anggaran tidak selalu berhubungan langsung dengan keberhasilan dalam pendidikan jika tidak disertai dengan tata kelola yang efektif. Ketidakefisienan dalam pengelolaan, seperti dominasi dana untuk Belanja Pegawai (Rp1,11 triliun) dan kebocoran hingga 70 persen dalam pemberian beasiswa, terbukti menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi layanan pendidikan.

Interpretasi ilmiah dari hasil tersebut adalah bahwa pendidikan merupakan investasi terhadap sumber daya manusia yang memiliki dampak jangka panjang, namun bisa terhambat oleh beban birokrasi dan kesalahan sasaran dalam bantuan. Secara komparatif, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil yang dipaparkan oleh Witta dan Handra (2025), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan secara keseluruhan cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kelulusan pendidikan menengah, disebabkan oleh tingginya belanja pegawai dan isu salah sasaran.

Namun, penelitian ini menyoroti perbedaan penting di tingkat lokal: meskipun menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berhasil menunjukkan ketahanan dengan melakukan penyesuaian kebijakan yang responsif. Analisis cepat dengan mencabut bantuan untuk kelompok di luar MBR dan meningkatkan anggaran beasiswa menjadi Rp190,56 miliar pada tahun 2026 menunjukkan bahwa pengeluaran publik dapat berfungsi secara efektif dalam mendorong pencapaian SDG 4 jika dikelola dengan pendekatan penargetan yang terbuka, tegas, dan langsung menyentuh akar masalah ekonomi yang dihadapi para peserta didik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan yang melebihi 20 persen tidak menjamin tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 4, kecuali didukung oleh pengelolaan belanja publik yang tepat. Dari sisi teori, penelitian ini memperkaya literatur keuangan negara dengan menunjukkan secara empiris bahwa kesalahan penargetan bantuan dan ketidakefisienan sistem pencatatan adalah penyebab utama dari tetap adanya kesenjangan dalam menyelesaikan pendidikan menengah. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan anggaran tidak hanya bergantung pada jumlah alokasi, tetapi juga pada kualitas kebijakan afirmatif yang berbasis data mikro dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tepat untuk menghindari pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Dari perspektif praktis, hasil studi ini menyarankan perlunya pergeseran dari kebijakan umum menuju kebijakan intervensi yang lebih terarah menggunakan model evaluasi responsif. Model ini bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah lainnya sebagai alat strategis untuk meningkatkan akurasi belanja sosial dalam pendidikan. Bagi lembaga pemerintah yang menjadi objek studi, disarankan untuk memperkuat pemeriksaan faktual dan integrasi data kemiskinan secara berkala untuk menekan angka putus sekolah. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan analisis kuantitatif terhadap dampak jangka panjang dari peningkatan kriteria beasiswa daerah terhadap penurunan rasio putus sekolah di tingkat menengah dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Agsa, R. (2026, 25 Januari). Eri Cahyadi evaluasi Beasiswa Pemuda Tangguh, temukan 70 persen penerima tak tepat sasaran. *AnalisaPublik.id*.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Hasibuan, M. I. (2024). Realizing quality education as a goal of the SDGs in Indonesia. *Airlangga Development Journal*.
- Klikku.id. (2025, 20 Agustus). 12 ribu anak putus sekolah di Surabaya, Pemkot kebut pendataan & giatkan wajib belajar. *Klikku.id*.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021, 16 Agustus). *Pemkot Surabaya komitmen SD-SMP gratis bagi peserta didik MBR jalur afirmasi*. Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) tahun anggaran 2025: Dinas Pendidikan*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025, 22 Desember). *Tambah kuota dan anggaran, Pemkot Surabaya jangkau lebih banyak penerima Beasiswa Pemuda Tangguh 2026*. Pemerintah Kota Surabaya.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Suwandaru, A., Alghamdi, T., & Nurwanto, N. (2021). Empirical analysis on public expenditure for education and economic growth: Evidence from Indonesia. *Economies*, 9(4), 146. <https://doi.org/10.3390/economies9040146>.
- Witta, S. R., & Handra, H. (2025). An analysis of the government's impact on achieving the SDGs in the education sector in Indonesia. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 9(2), 157–178. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v9i2.157-178>